

SKRIPSI



FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Oleh

HARNIATY BAHARUDDIN

B111 07 812

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Oleh

HARNIATY BAHARUDDIN

B111 07 812

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dari mahasiswi :

Nama : HARNIATY BAHARUDDIN

Nomor Induk : B111 07 812

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi dalam rangka penyelesaian studi.

Makassar, Desember 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

H.Muh.Imran Arief, S.H., M.H.
NIP. 19470915197901 1001

Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024198903 1002

ABSTRAK

HARNIATY BAHARUDDIN (B 111 07812). Fungsi Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Polsek Panakkukang Makassar, di bawah bimbingan Bapak H.Imran Arief selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh penyidik apabila hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban pemerkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu kasus pemerkosaan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polsek Panakkukang Makassar, dengan pertimbangan di tempat tersebut pemeriksaan terhadap kasus pemerkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya sering menggunakan visum et repertum untuk mendapatkan bukti-bukti yang penting dan memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. dari lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan lainnya guna penyusunan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan visum et repertum selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana pemerkosaan. dan juga visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya atau tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan. tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak terhingga, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat selesai tepat waktunya, dimana merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan, guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Drs.Baharuddin.T dan Ibunda Hamrawati S.Sos atas limpahan kasih sayang dan perhatian yang tidak akan pernah usai kepada Penulis, serta adikku tersayang, Haedir, Hasbin, Harfan, semoga Allah memberikan kasih sayang-Nya kepada mereka sebagaimana cinta dan belaian mereka yang tak pernah berakhir kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A.Patturusi, Sp.B., Sp.B.O selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak H.Muh.Imran Arief S.H.,M.S selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing Penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr.Aswanto S.H.,M.S.DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Amir Ilyas S.H.,M.H. Bapak Kaisaruddin Kamaruddin S.H serta Bapak Prof.Dr.Aswanto S.H.,M.S.DFM selaku penguji yang telah senantiasa memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Agung selaku Kepala Kepolisian Sektor Panakkukang dan para staff Polsek Panakkukang yang telah meluangkan waktu dan banyak memberi kemudahan

dalam perolehan data dan informasi untuk melengkapi skripsi ini.

7. Buat teman-teman, Dina, Ayu, Syawal, Anti, Dilla, Bayu, Nina dan adik-adik junior terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung. akhirnya teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara (i), serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai jahiriyah disisi Allah SWT. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kita kepada kita semua, terutama kepada Penulis sendiri. Amien

Makassar, Desember 2012

Penulis

Harniaty Baharuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana	14
1. Hukum Pidana Formil	17
a. Pengertian Penyidikan.....	21
b. Fungsi Penyidikan.....	23
c. Pejabat Penyidik, Tugas Dan Kewenangannya	24
2. Hukum Pidana Materiil	31
a. Pengertian Pemerkosaan	32
b. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP	33
B. Pengertian Visum Et Repertum	39
1. Jenis Visum Et Repertum	41
2. Bentuk Umum Visum Et Repertum	43
3. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti	45

C. Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Serta Dasar Hukum Penggunaannya Oleh Penyidik Menurut KUHAP	47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Jenis Dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan	58
1. Terdapatnya Unsur Persetubuhan Pada Diri Korban	74
2. Perkiraan Saat Terjadinya Persetubuhan Terhadap Korban.....	76
3. Adanya Unsur Kekerasan Pada Tubuh Korban	77
4. Hasil Pemeriksaan Terhadap Korban Barang Bukti Lain Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Pemerkosaan	78
B. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hal Visum et Repertum Tidak Memuat Tanda Kekerasan Terhadap Korban Pemerkosaan.....	85

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib

mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Ada pun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.”

Usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk

membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A.Karim Nasution (Wirjono Prodjodikoro, 1977 : 52) menyatakan :

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang

menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan

proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pemerkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan pemerkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan pemerkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus pemerkosaan. Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Makassar (LPA Makassar), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan pemerkosaan yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus pemerkosaan anak mengalami

peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2010 kekerasan seksual pada anak mencapai 82 kasus. Dari jumlah itu, kasus incest (hubungan seksual dalam keluarga) dan pemerkosaan anak meningkat. Tahun 2010, terdapat delapan kasus incest dengan korban anak dengan pelaku ayah kandung, paman, sampai kakek. Sedangkan, angka kekerasan fisik mengalami penurunan meski kasus ini justru terjadi di sekolah dan rumah tangga ([www. Makassar tribun timur](http://www.makassar.tribun-timur.com)).

Dari kualitas kejahatan pemerkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pemerkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak pemerkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban pemerkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Mengungkap suatu kasus pemerkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pemerkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban

Pemeriksaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pemeriksaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan ***visum et repertum***. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum*. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan pemeriksaan yang terjadi di daerah Hukum Polsek Makassar, terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan

bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Polsek Panakkukang Makassar bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.

Fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus Pemerkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana Pemerkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pemerkosaan.

Kenyataannya, tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus pemerkosaan yang demikian,

tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan fungsi *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pemerkosaan, pada kasus Pemerkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana pemerkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pemerkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana pemerkosaan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pemerkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik

pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Besar Makassar Sektor Kota Panakkukang Makassar) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan ?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil *visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

- 1) Untuk mengetahui fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan.

- 2) Untuk mengetahui upaya yang ditempuh penyidik apabila hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban pemerkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu kasus pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian :

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

- 1) Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat *visum et repertum* dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana.

2) Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai fungsi *visum et repertum* dan penerapannya oleh pihak Kepolisian selaku penyidik, khususnya dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat.

3) Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penggunaan *visum et repertum* bagi kepentingan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai definisi hukum pidana sebagai berikut :

Menurut van Hamel hukum pidana didefinisikan sebagai “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. (Moeljatno, 2009:8)

Sedangkan Simons memberikan definisi sebagai berikut : “Hukum Pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang mengancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barang siapa yang tidak mentaatinya, juga semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, serta semua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa :

“Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*criminal act*),
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal responsibility*);
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebagaimana dasar-dasar dan aturan yang diadakan oleh hukum pidana, menyebabkan hukum pidana dapat dipandang dari dua segi sebagai berikut :

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*).
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*).

Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang disertai ancaman pidana terhadap orang yang melanggarnya. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil berisikan peraturan tentang :

- a. Perbuatan yang diancam dengan hukuman ;
- b. Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana ;

- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan tentang tata cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Hukum pidana formil ini sering disebut hukum acara pidana.

Ius puniendi adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak negara atau alat perlengkapan negara untuk mengancam atau mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu. Mengancam pidana merupakan hak dari lembaga legislatif. Sedangkan mengenakan pidana dilaksanakan oleh lembaga peradilan.

Terkait dengan *ius poenale* yang dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, masing-masing hukum pidana tersebut mempunyai bentuk yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia ketentuan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan perundangan lainnya mengenai tindak pidana khusus, sedangkan hukum pidana formil dimana sebelumnya diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) sekarang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Hukum Pidana Formil

Ketentuan hukum pidana formil berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga sering pula disebut hukum acara pidana. Mengenai istilah hukum acara pidana, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut :

“Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *straf vordering* yang jika diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. (Andi Hamzah, 2001:2).

Menurut Simons, hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan sebagai berikut : “Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Wirjono Projodikoro, 1977:13).

Berdasarkan pengertian mengenai hukum acara pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana menetapkan aturan-aturan mengenai bagaimana alat-alat negara, yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum pidana materiil.

Mengenai fungsi hukum acara pidana, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pendapat Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2008:6) yang mengemukakan sebagai berikut :

“Bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal :

- a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara,
- b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut ;
- c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan ;
- d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim ;
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya ;
- f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim ;

- g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

Berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum acara pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti, dari bahan bukti inilah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Sebagaimana fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana dimana ditegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu :

- a) Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan.
- b) Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan penyelidikan adalah serangkaian upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukannya tindak pidana yang mempunyai arti penting dan berperan pada jalannya pemeriksaan sidang pengadilan serta pada gilirannya benar-benar mampu menetapkan, mempidana yang bersalah, atau membebaskan yang tidak bersalah, bahkan bagi yang merasa dirugikan atas kekurangtelitian dalam pemeriksaan pendahuluan, dapat memperoleh ganti rugi serta rehabilitasi nama baiknya.

Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, bukti-bukti suatu perkara pidana yang didapat pada proses penyidikan dan penuntutan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan dan memperjelas kebenaran materiil yang akhirnya menentukan penjatuhan putusan pada perkara pidana tersebut.

Penulisan skripsi ini dimana permasalahan yang diangkat terkait dengan ketentuan hukum acara pidana pada proses penyidikan, berikut ini paparan mengenai pemeriksaan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP serta undang-undang yang terkait

a. Pengertian Penyidikan

Mengenai yang dimaksud dengan penyidikan, berikut ini pengertian penyidikan ditinjau secara etimologis dan berdasarkan definisi yuridis yang diberikan oleh undang-undang :

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut. (R. soesilo 1987:17).

Istilah penyidikan terdapat juga dalam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminil yang menjelaskan mengenai kata sidik. Disebutkan didalamnya “Penyidikan atau penyidik berasal dari kata sidik yang berarti membuat terang atau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atau kebenaran”.

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Tahun 2002 No.2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

b. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. (Agung Legowo Tjiptomarto, 1987 : 4)

Sedangkan R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Mengenai arti kebenaran materiil yang ingin dicapai dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam Pedoman Kerja Reserse Kriminil diberikan penjelasan sebagai berikut “Kebenaran materiil ini bukan berarti kebenaran mutlak, karena segala apa yang telah terjadi (apabila jangka waktunya telah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya. Tetapi yang diartikan disini ialah kenyataan yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

c. Pejabat Penyidik, Tugas dan Kewenangannya

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHP menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, hal ini disebutkan lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) KUHP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
- b. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di

bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan ;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan ;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak ;
- k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana ;
- l. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ;
dan
- m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas (pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

- b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

2. Hukum Pidana Materiil.

Hukum pidana materiil memberi pengaturan mengenai tiga hal pokok sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang diancam dengan hukuman
- b. Mengatur pertanggungjawab terhadap hukum pidana
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Ketentuan hukum pidana materiil ini diatur dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya tentang tindak pidana khusus. Terhadap isi hukum pidana materiil yang menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya hal ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Salah satu jenis perbuatan yang apabila dilakukan diancam dengan pidana atau disebut juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemerkosaan. Terkait

dengan perbuatan pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana, berikut ini uraian mengenai pengertian pemerkosaan serta pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP.

a. Pengertian Pemerkosaan

Kejahatan pemerkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata pemerkosaan yang berarti “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi” Berdasarkan pengertian tersebut maka Pemerkosaan mempunyai makna yang luas yang tidak hanya terjadi pada hubungan seksual (*sexual intercourse*) tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya.

Menurut Soetardjo Wignjo Soebroto, (2000:20), yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud pemerkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

Berdasarkan pengertian pemerkosaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan pidananya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

b. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam KUHP

Mengenai tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pidananya terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Adami Chazawi, 2007:62).

Berdasarkan rumusan tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatannya : memaksa,
- b. Caranya :
 - 1) dengan kekerasan,
 - 2) dengan ancaman kekerasan;
- c. seorang wanita bukan istrinya;
- d. bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

Satochid Kartanegara (Hukum Pidana Bagian Dua, 588) mengemukakan bahwa : “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain” Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan

kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

- b. Kekerasan (*geweld*) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Beberapa pakar memberikan pengertian kekerasan sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo kekerasan ialah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah”. Sedangkan Satochid mengartikan kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat”.

Secara lebih khusus, Adami Chazawi (2007:65) memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut : “Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk

mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.

Mengenai maksud dari ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*), undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya. Namun dalam arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan :

- a) Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya,
- b) Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan. P.A.F. Lamintang (1990:29).

Menurut Adami Chazawi, (2007:65) ancaman kekerasan diartikan yaitu:

“ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku”.

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut.

- c) Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena perbuatan bersetubuh

dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan.

- d) Menurut M.H.Tirtamidjaja (Leden Marpaung,2005:52) “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. (Moch.Anwar ,1986:66).

Pada saat ini pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP diatas, pemerkosaan tidaklah disebut pemerkosaan apabila tidak terbukti adanya persetubuhan, padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin). Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai pemerkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetubuhan, kasus tersebut

dapat diarahkan pada tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya persetujuan.

B. Pengertian Visum et Repertum

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, Prof.Sutomo Tjokronegoro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian , kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman. (Waluyadi, 2000 :1)

Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi.

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. ([http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/Fungsi Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pidana Indonesia](http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/Fungsi-Et-Repertum-Dalam-Tindak-Pidana-Pidana-Indonesia))

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan

pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Abdul Mun'im Idris (1997:2) memberikan pengertian *visum et repertum* sebagai berikut : “Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Dari pengertian *visum et repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan..

1. Jenis Visum et Repertum

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *visum et repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut :

a. *Visum et repertum* untuk orang hidup.

Jenis ini dibedakan lagi dalam :

1) *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

2) *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.

3) *Visum et repertum* lanjutan . Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis

kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

c. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

d. *Visum et repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

e. *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

f. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

Dalam penulisan skripsi ini, *visum et repertum* yang dimaksud adalah visum et repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan

2. Bentuk Umum Visum et Repertum

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut :

- a. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
- b. Di tengah atas dituliskan Jenis visum et repertum serta nomor *visum et repertum* tersebut.
- c. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 - 1) Identitas Peminta *visum et repertum*.
 - 2) Identitas Surat Permintaan Visum et Repertum.
 - 3) Saat penerimaan Surat Permintaan Visum et Repertum.
 - 4) Identitas Dokter pembuat *visum et repertum*.
 - 5) Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*.
 - 6) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan Visum et Repertum.
- d. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.

- e. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
- f. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *visum et repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
- g. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

3. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Hanya didalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

KUHAP tidak pula menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti. Perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.

Apabila ditinjau dari ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi (2000:37), *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.

Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan

visum et repertum sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa : “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

C. Fungsi Visum et Repertum Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Serta Dasar Hukum Penggunaannya Oleh Penyidik Menurut KUHAP

Mengenai fungsi *visum et repertum* dalam proses penanganan perkara, sebelum membahas bagaimana fungsi tersebut, berikut ini yang dimaksud dengan arti kata “fungsi”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “fungsi” diartikan sebagai “seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “fungsi” diartikan yaitu “bagian dari tugas

yang harus dijalankan”. Kata “fungsi” diartikan proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, diterapkan dengan fungsi *visum et repertum*, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi *visum et repertum* yaitu bagian dari tugas, cara, proses, yang dapat diikatkan pada *visum et repertum* menurut kedudukannya. Apabila meninjau fungsi *visum et repertum* dalam penanganan suatu perkara, khususnya dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini mempunyai arti yaitu tugas, cara, proses, yang dapat dilakukan dan atau diberikan oleh *visum et repertum* dalam kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana pemerkosaan.

Menurut Abdul Mun' im Idries (1997:7), sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang Dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.

2. Bukti penahanan tersangka.

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh Dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan

visum et repertum yang dibuat oleh Dokter spesialis forensik atau atau Dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat visum et repertum adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Mengenai dasar hukum fungsi *visum et repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh Dokter pada *visum et repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b) Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan :
“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan :
“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan Dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada

pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan :
“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Bantuan Dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 KUHAP). Bantuan Dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan Dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat *visum et repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan.

Sebagaimana tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka hal ini menuntut aparat penegak hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada setiap tahap pemeriksaannya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu

perkara pidana dan akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam pemeriksaan penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan.

Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana pemerkosaan, jenis tindak pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksudkan pada KUHP Pasal 1 butir 25 yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana pemerkosaan, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan sebagai salah satu jenis tindak pidana

kesusilaan dalam pelaksanaannya mempunyai kekhususan karena bentuk dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita untuk bersetubuh dengan dirinya di luar pernikahan, dengan sendirinya penyidikan terhadap tindak pidana ini akan mengusut suatu perbuatan asusila mengenai persetubuhan yang menimbulkan korban seorang wanita. terhadap tindak pidana ini pada umumnya petugas penyidik terdiri dari penyidik wanita yang diharapkan mampu melakukan pendekatan terhadap wanita korban pemerkosaan yang sering mengalami trauma psikologis akibat pemerkosaan yang dialami, dengan tujuan dapat mengumpulkan keterangan dan bukti selengkap mungkin dalam rangka menemukan kebenaran materiil perkara tersebut.

Berdasarkan data yang ada di Polsek Panakkukang Makassar yaitu adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, yang diduga dilakukan oleh Jamaluddin terhadap diri Kiki Nuraeni dengan cara pertama-tama Jamaluddin memeluk sambil mencium Kiki Nuraeni selanjutnya Jamaluddin membuka baju kaos warna putih yang dikenakannya kemudian menutup/menyumbat mulut Kiki

Nuraeni dengan menggunakan baju kaos tersebut dan selanjutnya Jamaluddin membaringkan Kiki Nuraeni kemudian membuka celana Kiki Nuraeni begitupun Jamaluddin melakukan hal yang sama yaitu membuka celana sebatas lutut dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Kiki Nuraeni sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, sehingga Kiki Nuraeni merasakan sakit pada bagian alat kemaluan Kiki Nuraeni dan mengeluarkan darah. yang terjadi pada Hari Minggu 07 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di atas pete-pete di jalan Pettarani Kec.Panakkukang Makassar. dan telah cukup bukti disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) subs 82 UU RI Nomor.23 Tahun 2002 Jo.Pasal 285 subs Pasal 290 ke-2 KUHPidana.

Keberadaan Visum et repertum yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP Juncto Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya.

Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban pemerkosaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis. Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya.

Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui terjadinya suatu tindak pidana. bukti-bukti ini pula yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana pemerkosaan dimana harus dibuktikan adanya unsur persetubuhan, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat visum et repertum dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Mengenai barang bukti berupa visum et repertum, dalam kasus pemerkosaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana.

Setelah dibuat laporan polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh visum et repertum yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur persetubuhan dan ancaman kekerasan. kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan. pembuatan visum et repertum harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana pemerkosaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. dalam prosedur untuk mendapatkan visum et repertum tersebut, hal ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam Undang-undang. dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta visum et repertum adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983) yang sekarang dengan

berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol).

- b. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya. Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983) yang sekarang berubah menjadi Brigadir Dua Polisi (BRIPDA Pol.)

berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan visum et repertum dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan harus diajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos.
- b. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama-sama korban atau barang buktinya ke Rumah Sakit, Puskesmas atau Dokter.
- c. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. hal ini mengingat

akan adanya kewajiban menyimpan rahasia Kedokteran bagi seorang Dokter.

d. di dalam Surat Permintaan Visum et Repertum harus dicantumkan :

1. jenis surat permintaan visum et repertum
2. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin
3. keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.

e. Untuk korban luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusulkan Surat Permintaan Visum et Repertum jenazah.

f. Untuk permintaan visum et repertum jenazah, maka berarti bahwa jenazah harus dioutopsi. tidak dibenarkan meminta visum et repertum luar saja, oleh karena Dokter tidak mungkin memberikan Kesimpulan tentang sebab kematiannya tanpa outopsi.

g. POLRI bertanggung jawab atas keamanan Dokter selama melakukan outopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukan outopsi. untuk ini sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) KUHP, perlu diberikan penjelasan oleh Penyidik tentang perlunya outopsi

tersebut. bahkan apabila dipandang perlu dapat ditegakkan Pasal 222 KUHAP.

- h. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) KUHAP serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti termasuk jenazah harus diberikan label yang bersegel.

Dalam prosedur untuk mendapatkan visum et repertum korban pemerkosaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan Visum et Repertum (SPVR) Korban Pemerkosaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut :

1. Nama,tanggal lahir/umur,kewarganegaraan,pekerjaan,agama dan alamat.
2. Tempat dan waktu terjadinya pemerkosaan
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa,tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.

Pembuatan SPVR korban pemerkosaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHP mengenai bentuk permintaan keterangan oleh penyidik dimana disebutkan bahwa "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat". Permintaan visum et repertum ini tidak hanya dapat dimintakan pada Rumah Sakit pemerintah namun juga dapat dimintakan pada Rumah Sakit swasta. setelah dipenuhinya syarat administrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud.

Dalam pembuatan visum et repertum pemerkosaan, pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis kandungan dan penyakit kebidanan (Spesialis Obstetri Ginekologi) yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur persetubuhan yang dialami korban pemerkosaan, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis

terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada alat kelamin korban.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan untuk mendapatkan visum et repertum diatas, hasil visum et repertum baru dapat diketahui oleh penyidik dalam jangka waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan setelah pemeriksaan terhadap korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan visum et repertum tersebut, juga dilakukan beberapa test laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.

Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban pemerkosaan mempunyai fungsi yang penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan yang terjadi pada korban. mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda persetubuhan pada diri korban pemerkosaan, maka fungsi visum et repertum sangat penting untuk membuktikan hal tersebut, pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban pemerkosaan hanya sebatas pada pemeriksaan luar fisik dan tidak mungkin dapat mengetahui tanda persetubuhan yang terdapat dalam alat kelamin korban.

Disamping untuk membuktikan adanya tanda persetubuhan pada diri korban, visum et repertum juga dapat memuat hasil pemeriksaan terhadap adanya tanda kekerasan pada diri korban. terhadap unsur ini merupakan unsur yang juga penting disamping unsur persetubuhan dalam tindak pidana pemerkosaan. kedua unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dicari dan ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus pemerkosaan.

Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang penting bagi penyidik untuk mengadakan tindakan lebih lanjut dalam penyidikannya, seperti melakukan pengeledahan, penyitaan, penahanan, atau tindakan penyidikan lainnya.

Berikut hal-hal yang secara umum termuat dalam visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

1. Pada bagian Pemberitahuan atau Hasil Pemeriksaan

Dalam visum et repertum yang dimintakan untuk penyidikan kasus pemerkosaan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. keadaan luar korban seperti mengenai pakaian yang dikenakan (meliputi pakaian dalam), alas kaki yang dikenakan, dan barang lain yang dikenakan korban. mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian atau benda lainnya tersebut dikenakan korban pada saat lainnya tersebut dikenakan korban pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan.
- b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kelainan dan atau tanda kekerasan pada bagian tubuh yang meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.

c. Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap :

- Otak Lingkar dubur (regangan baik atau tidak)
- Selaput lender poros usus (licin atau tidak)
- Selaput dara (mengalami robekan atau tidak, lama atau baru robekan tersebut, pada arah jam berapa robekan tersebut berada)
- Kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak)
- Rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan)

d. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap

- Lendir liang senggama (apakah didapati sel mani atau tidak)
- Air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positif atau negatif)

2. Pada bagian Kesimpulan

Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang :

a. Keadaan selaput dara penderita (pernah mengalami persetubuhan atau tidak)

- b. Adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut
- c. Adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban
- d. Ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.

Bagian Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari visum et repertum karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. bagian ini merupakan yang paling obyektif dan menjadi inti visum et repertum karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. setiap bentuk kelainan yang terlihat dan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu visum et repertum yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pandapatnya.

Dengan membaca hal-hal yang termuat dalam visum et repertum terutama pada bagian Pemberitahuan seperti tersebut diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam visum et repertum penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapatnya Unsur Persetubuhan Pada Diri Korban.

Unsur persetubuhan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan. menurut Ilmu Kedokteran Forensik persetubuhan diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pemeriksaan unsur persetubuhan dalam ini dipengaruhi dari bentuk dan elastisitas selaput dara, besarnya penis dan derajat penetrasinya, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulasi itu sendiri, posisi persetubuhan, serta keaslian keadaan korban pada waktu pemeriksaan.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/persetubuhan>)

Terhadap unsur persetubuhan, dalam visum et repertum tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetubuhan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak mengalami persetubuhan. elastisitas selaput dara, besar kecilnya penis, derajat penetrasi penis, serta posisi

persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara korban.

Berdasarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk penentuan adanya tanda persetubuhan tersebut diatas,

Namun apabila menurut hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban ditemukan sel mani maka hal ini merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan pada korban. demikian juga apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin tertentu yang hanya menular dari persetubuhan jelas merupakan tanda pasti akibat adanya persetubuhan.

Mengenai unsur persetubuhan apakah korban seperti wanita yang belum atau pernah bersetubuh, hal ini selalu dinyatakan oleh Dokter pada bagian kesimpulan visum et repertum tersebut. untuk mengetahui dan membuktikan adanya unsur persetubuhan, pada umumnya penyidik mengacu pada hasil pemeriksaan selaput dara di bagian Hasil Pemeriksaan serta pendapat dokter di bagian hasil kesimpulan visum et repertum.

Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk menentukan tanda persetubuhan sebagaimana tersebut diatas,

hal ini tidak begitu diperhatikan oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat dalam visum et repertum tersebut.

2. Perkiraan Saat Terjadinya Persetubuhan Terhadap Korban

saat terjadinya persetubuhan penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana pemerkosaan yang disangkakan. ada tidaknya sel mani pada liang senggama korban yang dapat termuat dalam visum et repertum dapat menunjukkan saat terjadinya persetubuhan. mengenai hal ini terdapat dasar pemeriksaan sperma yang menunjukkan bahwa sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-coital.

sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam post-coital, dan bila wanitanya mati masih akan dapat ditemukan sampai 7-8 hari. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban yang termuat dalam visum et repertum, hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk memperkirakan saat terjadinya persetubuhan dalam suatu tindak pidana pemerkosaan. demikian pula mengenai hasil pemeriksaan terhadap umur kehamilan, hal ini juga dapat dijadikan petunjuk

oleh penyidik dalam hal menentukan kebenaran kapan tindak pidana pemerkosaan dilakukan.

3. Adanya Unsur Kekerasan Pada Tubuh Korban

Unsur kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan harus dapat ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat memproses perkara tersebut lebih lanjut. adanya unsur persetubuhan tanpa ditemukan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan perkara tersebut dihentikan penyidikannya. visum et repertum yang menerangkan mengenai tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat menunjukkan unsur kekerasan pada pengungkapan tindak pidana pemerkosaan.

Untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh korban pemerkosaan, sebelumnya perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta disekitar dan pada alat genital. luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan serta luka-luka memar.

Di dalam hal pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan meninggalkan jejak atau bekas yang

berbentuk luka. oleh karena tindakan pembiusan dikategorikan pula sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan medis untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang sekiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan.

Dalam visum et repertum tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan serta keadaan kerampang kemaluan korban yang selalu termuat pada bagian pemberitaan.

4. Hasil pemeriksaan terhadap korban barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan

Dalam pembuatan visum et repertum yang dilakukan terhadap korban pemerkosaan, biasanya disertakan barang bukti yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana pemerkosaan, seperti misalnya celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang terpenting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut. fungsi atau manfaat visum et repertum sebagaimana terurai diatas menunjukkan fungsi teknis visum et repertum yang dapat membantu dan member petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan. kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban yang tercantum dalam visum et repertum.

Serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil visum et repertum, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pemerkosaan. visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan membantu penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan dari korban, saksi, tersangka, serta pemeriksaan barang bukti lainnya. dengan adanya visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap seorang wanita yang diduga sebagai korban pemerkosaan, seorang penyidik akan memperoleh suatu

keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar telah terjadi atau sebaliknya.

Fungsi visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan, tentunya harus didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materiil yang sejati dalam pemeriksaan perkara tersebut. terdapat keterbatasan hasil visum et repertum dalam fungsinya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan, hal ini terjadi khususnya terkait dengan keaslian keadaan korban pemerkosaan pada waktu pemeriksaan.

Keadaan lainnya yang sudah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana pemerkosaan terjadi (misalnya korban sebelumnya dalam keadaan tidak virgin), serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. adanya kemungkinan hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap korban yang termuat dalam visum et repertum tersebut, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil visum et repertum justru tidak ditafsirkan dengan salah. tindakan lain seperti dengan mencari keterangan dari korban, tersangka, saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara.

Visum et repertum yang didalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, hal ini mempunyai peran yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana pemerkosaan. visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penindakan. bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah. penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

menurut penyidik visum et repertum dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan dianggap sebagai alat bukti surat. sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, visum et repertum telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. pembuatan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan dan

permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan SPVR (Surat Permintaan Visum et Repertum) korban pemerkosaan. hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan fungsi yang dapat diberikan visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana terurai diatas, hal ini menyebabkan kedudukan visum et repertum menjadi salah satu alat bukti yang penting dan harus ada dalam pemeriksaan perkara tersebut sampai di tahap persidangan. Pembuatan visum et repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan.

Tidak adanya visum et repertum dalam berkas perkara tindak pidana pemerkosaan yang dibuat penyidik yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat visum et repertum pada pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan, terhadap pembuktian adanya

unsur persetujuan hal ini secara lebih pasti dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk diajukan ke persidangan.

Adanya visum et repertum dalam penyidikan suatu tindak pidana pemerkosaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. visum et repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan

sumpah jabatan seorang dokter berfungsi member keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. terhadap unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana pemerkosaan. hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam visum et repertum terhadap korban. hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur persetubuhan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil visum et repertum yang disertakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Melihat fungsi visum et repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan visum et repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. kedudukan visum et repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. dalam hal ini diharapkan visum et repertum dapat berfungsi secara optimal dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana pemerkosaan yang diperiksanya.

B. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hal Visum et Repertum Tidak Memuat Tanda Kekerasan Terhadap Korban Pemerkosaan.

Sebagaimana rumusan Pasal 285 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan yang menyatakan bahwa : “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. hal ini mensyaratkan bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan harus dipenuhi unsur-unsur seperti adanya persetubuhan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara memaksa, serta dilakukannya persetubuhan tersebut terhadap seorang wanita yang bukan istri pelaku.

Untuk mendapatkan bukti mengenai unsur persetubuhan dan kekerasan pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan, penyidik akan melakukan serangkaian upaya dan tindakan untuk memperoleh bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut. salah satu upaya penyidik untuk

membuktikan kedua hal tersebut adalah melalui pembuatan visum et repertum terhadap korban.

Dalam visum et repertum, terhadap unsur persetubuhan hal ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana pemerkosaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. namun terhadap tanda kekerasan pada diri korban pemerkosaan, hal ini dapat tidak memuat dalam visum et repertum, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu. pembuktiannya unsur kekerasan yang dapat dilihat dari hasil visum et repertum korban pemerkosaan mempunyai fungsi yang membantu penyidik agar dapat segera memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya.

Termuatnya hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapatnya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban memberi kemudahan bagi penyidik dalam mengungkap perkara tersebut, terlebih apabila tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha, serta disekitar pada alat genital. luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan, serta

luka-luka memar, termuatnya tanda kekerasan yang demikian pada visum et repertum korban, tidak saja membantu penyidik mengungkap tindak pidana pemerkosaan namun juga dapat member keyakinan bagi hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan.

Unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan diartikan yaitu cara/upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. sedangkan Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sebagai berikut “membuat orang pingsan atau tidak berdaya sehingga ia dapat melakukan persetubuhan terhadap wanita tersebut, perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan.

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan diartikan apabila ada perbuatan pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk melakukan persetubuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban terpaksa membiarkan persetubuhan tersebut terjadi. bentuk-bentuk kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan yang selama ini ditemui penyidik seperti kekerasan dipaksa dengan

ditarik baju dan tubuh korban, disekap, diikat, diberi minuman sehingga korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, diancam dengan pisau, dan tindakan pemaksaan lainnya dengan ancaman senjata tajam.

Dalam hal hasil pemeriksaan korban pemerkosaan yang termuat dalam visum et repertum menyatakan bahwa pada diri korban pemerkosaan didapati tanda persetubuhan namun tidak tanda kekerasan, agar dapat ditemukan bukti adanya unsur kekerasan ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut sehingga menjadi terang tindak pidananya.

Upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan dilakukannya tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Pemanggilan Tersangka dan Korban

Terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Dalam metode pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Interogasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak

pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi yang dilakukan terhadap tersangka dan korban dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 7-kah terjadinya suatu tindak pidana 7-kah yang dimaksud yaitu mengenai :

- 1) Apakah yang terjadi ? (macam peristiwa atau perbuatannya)
- 2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (waktunya)
- 3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi ? (tempatnya)
- 4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut ? (pelakunya)
- 5) Mengapa perbuatan tersebut dilakukan ? (alasannya)
- 6) Dengan apa perbuatan tersebut dilakukan ? (alatnya)
- 7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan ? (caranya)

secara khusus jenis pertanyaan yang diberikan penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan seperti misalnya sebagai berikut :

- Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum terjadinya persetubuhan ?
- Dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh pelaku ?
- Apakah saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan persetubuhan ?
- Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika persetubuhan terjadi ?

Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan khususnya kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama dalam hal pengaduan dan visum et repertum korban telah menunjukkan adanya unsur persetubuhan namun belum ditemukan adanya unsur kekerasan.

- b. Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (sesama tersangka, sesama saksi, dan tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.
2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Atas keterangan yang didapat dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang terkait dengan tindak pidana. dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP ditemukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu :

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan, benda-benda yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, terutama celana dalam yang sering terdapat noda darah atau sperma, sprei, (alas tidur tempat dilakukannya persetubuhan) yang terdapat bekas sperma atau noda darah, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban, seperti pisau atau senjata lainnya, sisa minuman atau obat yang digunakan pelaku untuk membuat korban tidak berdaya, atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan visum et repertum seperti misalnya celana dalam korban biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam visum et repertum korban pemerkosaan.

3. Bila Perlu dilakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dalam hal pengaduan tindak pidana pemerkosaan dilakukan segera setelah terjadinya pemerkosaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, khususnya dalam rangka pembuktian unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban. barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana pemerkosaan seperti misalnya sprei (alas tidur tempat dilakukannya pemerkosaan), noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan di atas, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal mendapatkan hasil visum et repertum yang tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban pemerkosaan. tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana pemerkosaan agar dapat dihindari adanya penghentian penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal memang benar telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan.

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117,118,119 KUHAP, serta penyidik harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,Pasal 53,Pasal 54,Pasal 55, dan Pasal 114 KUHAP.

Demikian pula mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46, KUHAP. pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. terdapat pengungkapan tindak pidana pemerkosaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil visum et repertum korban, namun dalam tidak termuatnya keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban dalam visum et repertum tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu untuk menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan azas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan visum et repertum selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana pemerkosaan. Fungsi visum et repertum dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut :
 - a. visum et repertum dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana pemerkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pemerkosaan.
 - b. hasil yang termuat dalam visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pemerkosaan
 - c. keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana

pemeriksaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.

2. Bahwa dalam hal visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi visum et repertum dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan visum et repertum oleh

aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini bagi penyidik, seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.

- b. Mengingat terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam visum et repertum, seperti keaslian keadaan korban pemerkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan tertentu lainnya yang sudah terjadi pada diri korban (misalnya sebelum tindak pidana perkosaan korban sudah pernah bersetubuh/tidak virgin, keadaan elastisitas selaput dara korban, derajat penetrasi saat perkosaan, dan keadaan khusus lainnya), terhadap kemungkinan hal-hal tersebut sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil visum et repertum. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi hasil visum et repertum. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya hasil visum et repertum yang diperoleh yang selanjutnya dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut.
- c. Hal-hal yang termuat dalam visum et repertum korban pemerkosaan yang selama ini selalu dalam bentuk yang umum dan baku mengenai hal-hal yang diperiksa, sebaiknya dapat dilakukan secara lebih lengkap dan tidak terpaku pada hal-hal yang umum

tersebut. Seperti misalnya mengenai bentuk dari tanda-tanda kekerasan dan tanda persetubuhan, kemungkinan korban mengalami keadaan pingsan atau tidak berdaya saat dilakukan perkosaan, hal ini sebaiknya dicantumkan pula dalam visum et repertum. Hasil yang lengkap ini sebaiknya juga diikuti dengan pemaparan yang jelas dan tidak banyak mengandung kata-kata medis yang kurang dipahami oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idris, **Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik**, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2001.
- **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008
- Chazawi, Adami. 2007. **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1987. **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politeia, Bogor.
- Leden Marpaung, 2005. **Asas Teori-Praktik Hukum Pidana Jakarta**, PT. Sinar Grafika.
- Agung Legowo Tjiptomartono, **Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan**, Karya Unipres, Jakarta, 1987.
- Moch. Anwar, **Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II**, Alumni Bandung, 1986.
- Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Moeljatno. 2009. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia** Bandung, Sumur Bandung, 1977.
- P.A.F. Lamintang, **Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan**. Mandar Maju, Bandung, 1990.

Soetardjo Wignjo Soebroto, **Kejahatan Pemerkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial**, Yogyakarta, 2000.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasan, Karya Anda, Surabaya.

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Artikel :

Kasus Perkosaan Anak Meningkat, Makassar Tribun Timur.

Website :

[http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/ Fungsi Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Indonesia](http://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/Fungsi-Et-Repertum-Dalam-Penyidikan-Tindak-Pidana-Indonesia)

<http://id.wikipedia.org/wiki/persetubuhan>